

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE JULI 2019**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian  
Sub Bidang Informasi Kepegawaian

Terbitan Ke Empatbelas  
Edisi Juli 2019 (Semester 1)  
No. ISSN : 2406-8004

*Pembina :*  
Asri, SH., M.Si.

*Penanggungjawab :*  
Purwoko, S.Sos.

*Koordinator :*  
Tauhid Thalib

Djafar  
Sandi Gustomo

*Tim Pendukung :*  
Dwi Astuty  
Suparti  
Ince Rahayu

Nurul Fitri Fatimah  
Andi Datu Parampasi

*Diizinkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya.*



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Visi :**

"Sulawesi Tengah Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing"

**Misi :**

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan Dan Ketaqwaan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
4. Percepatan Reformasi Birokrasi, Penegakan Supremasi Hukum Dan HAM;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal Dan Berkelanjutan.

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***Visi:***

"Sebagai Garda Terdepan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa Dan Profesional"

***Misi:***

1. Melakukan Pembenahan Dan Penyempurnaan Sistem Manajemen Aparatur;
2. Melakukan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Dan Orientasi Capaian Kinerja;
3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian;
4. Melakukan Pembenahan Reformasi Birokrasi Pada Aspek Pengelolaan SDM Aparatur Untuk Mewujudkan Sulawesi Tengah Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.

**Sambutan  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**Asri, SH, M.Si.**

Syukur kehadiran Allah SWT dan ucapan terima kasih Saya sampaikan kepada Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah karena kembali menerbitkan Buku Statistik Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah.

Data, angka dan informasi kepegawaian yang terangkum dalam bentuk Buku Statistik Kepegawaian semacam ini merupakan suatu hal penting yang perlu secara terjadwal hadir dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Terkhusus bagi kalangan internal pemerintahan dan pengambil kebijakan bidang kepegawaian. Literatur demikian juga dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak diluar pemerintahan. Karena itu, penerbitan Buku ini adalah suatu upaya yang efektif menunjukkan eksistensi pemerintah ditengah masyarakat. Sekaligus juga sebagai jawaban atas semakin besarnya tuntutan publik akan keterbukaan informasi.

Begitu strategisnya Buku ini, maka Buku Statistik Kepegawaian, khususnya periode Semester I 2019 ini harus bisa hadir secara rutin dan dalam jumlah cetakan yang memadai. Tentunya dengan tetap melakukan evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan Buku ini dimasa akan datang. Akurasi dan variasi data, ragam gambar dan hal lainnya, perlu terus ditingkatkan kualitasnya sehingga Buku ini bisa semakin bemeilai dan menarik. Tidak sekedar menjadi tempat pemaparan angka-angka saja.

Kiranya Buku Statistik Kepegawaian ini bermanfaat bagi Kita semua.

Bab 1

**Keadaan PNS  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018**

**1. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	Provinsi Sulawesi Tengah	6.101	49.51%	6.222	50.49%	12.323

**2. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	Badan Kepegawaian Daerah	52	35	87
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	40	15	55
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44	33	77
4	Badan Pendapatan Daerah	141	121	262
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	42	26	68
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	69	69	138

7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42	44	86
8	Badan Penghubung Provinsi	21	28	49
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84	83	167
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	16	32	48
11	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	24	18	42
12	Biro Adm. Perekonomian Dan Pembangunan	28	26	54
13	Biro Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	13	9	22
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	18	15	33
15	Biro Hukum	15	20	35
16	Biro Organisasi	21	16	37
17	Biro Otonomi Daerah	17	24	41
18	Biro Umum	109	80	189
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	151	52	203
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	185	63	248
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	59	39	98
22	Dinas Kehutanan Provinsi	365	118	483
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	99	60	159
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	30	18	48
25	Dinas Kesehatan Provinsi	109	173	282

26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	33	24	57
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	31	37	68
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	33	28	61
29	Dinas Pangan Provinsi	30	37	67
30	Dinas Pariwisata Provinsi	37	37	74
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	41	37	78
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	15	51	66
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	53	34	87
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	33	35	68
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	2663	3115	5778
36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	11	38	49
37	Dinas Perhubungan Provinsi	71	44	115
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	60	48	108
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	180	85	265
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	59	61	120
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	44	30	74
42	Dinas Sosial Provinsi	95	106	201
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	206	146	352
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	126	72	198

45	Inspektorat Daerah	50	46	96
46	Rumah Sakit Madani Palu	92	225	317
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	193	609	802
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	101	9	110
49	Sekretariat Daerah	6	1	7
50	Sekretariat DPRD Provinsi	44	50	94
<b>TOTAL</b>		<b>6.101</b>	<b>6.222</b>	<b>12.323</b>

### 3. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	PERANGKAT DAERAH	PNS JENIS JABATAN									TOTAL
		STRUKTURAL (Ess I - IV)			FUNGSIONAL			PELAKSANA			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	Badan Kepegawaian Daerah	16	4	20	0	1	1	36	30	66	87
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	12	5	17	0	0	0	28	10	38	55
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	4	14	0	0	0	34	29	63	77
4	Badan Pendapatan Daerah	39	25	64	0	0	0	102	96	198	262
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	13	8	21	1	0	1	28	18	46	68
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14	7	21	0	0	0	55	62	117	138
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4	11	15	14	9	23	24	24	48	86
8	Badan Penghubung Provinsi	1	4	5	0	0	0	20	24	44	49
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	8	20	0	0	0	72	75	147	167
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	6	7	13	0	0	0	10	25	35	48
11	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	13	0	13	0	0	0	11	18	29	42



12	Biro Adm. Perekonomian Dan Pembangunan	9	4	13	0	0	0	19	22	41	54
13	Biro Bina Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	8	5	13	0	0	0	5	4	9	22
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	8	5	13	0	0	0	10	10	20	33
15	Biro Hukum	5	8	13	0	0	0	10	12	22	35
16	Biro Organisasi	7	6	13	0	0	0	14	10	24	37
17	Biro Otonomi Daerah	5	8	13	0	0	0	12	16	28	41
18	Biro Umum	8	5	13	0	0	0	101	75	176	189
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	20	4	24	0	0	0	131	48	179	203
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	22	11	33	0	0	0	163	52	215	248
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	29	16	45	0	0	0	30	23	53	98
22	Dinas Kehutanan Provinsi	63	13	76	74	21	95	228	84	312	483
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	30	15	45	0	0	0	69	45	114	159
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	8	4	12	0	0	0	22	14	36	48
25	Dinas Kesehatan Provinsi	16	13	29	18	55	73	75	105	180	282
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	14	7	21	0	0	0	19	17	36	57
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	8	12	20	0	0	0	23	25	48	68
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	9	9	18	0	0	0	24	19	43	61
29	Dinas Pangan Provinsi	11	7	18	4	1	5	15	29	44	67
30	Dinas Pariwisata Provinsi	5	16	21	0	0	0	32	21	53	74
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	13	7	20	0	0	0	28	30	58	78
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	6	15	21	0	0	0	9	36	45	66
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	14	7	21	0	0	0	39	27	66	87
34	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	13	16	29	0	0	0	20	19	39	68
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	29	26	55	2359	2821	5180	275	268	543	5778

36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	5	5	10	0	0	0	6	33	39	49
37	Dinas Perhubungan Provinsi	15	5	20	0	0	0	56	39	95	115
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	17	12	29	3	6	9	40	30	70	108
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	25	16	41	23	7	30	132	62	194	265
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	15	10	25	10	28	38	34	23	57	120
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	14	7	21	0	0	0	30	23	53	74
42	Dinas Sosial Provinsi	22	10	32	0	0	0	73	96	169	201
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	23	14	37	70	31	101	113	101	214	352
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	18	18	36	33	13	46	75	41	116	198
45	Inspektorat Daerah	5	2	7	27	31	58	18	13	31	96
46	Rumah Sakit Madani Palu	0	10	10	61	193	254	31	22	53	317
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	13	17	30	132	499	631	48	93	141	802
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	17	3	20	0	0	0	84	6	90	110
49	Sekretariat Daerah	6	1	7	0	0	0	0	0	0	7
50	Sekretariat DPRD Provinsi	3	7	10	0	0	0	41	43	84	94
<b>TOTAL</b>		<b>698</b>	<b>459</b>	<b>1157</b>	<b>2829</b>	<b>3716</b>	<b>6545</b>	<b>2574</b>	<b>2047</b>	<b>4621</b>	<b>12.323</b>

#### Rekap PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Pria	%	Wanita	%	
1	Struktural	698	5,66%	459	3,72%	1.157
2	Fungsional	2.829	22,96%	3.716	30,15%	6.545
3	Pelaksana	2.574	20,89%	2.047	16,61%	4.621
<b>TOTAL</b>		<b>6.101</b>	<b>49,92%</b>	<b>6.222</b>	<b>50,49%</b>	<b>12.323</b>

#### 4. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang

No.	PERANGKAT DAERAH	GOLONGAN RUANG												JUMLAH
		I			II			III			IV			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	15	9	24	31	24	55	6	2	8	87
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	2	1	3	13	3	16	19	9	28	6	2	8	55
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	16	5	21	21	24	45	7	4	11	77
4	Badan Pendapatan Daerah	1	2	3	50	31	81	78	76	154	12	12	24	262
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	1	0	1	11	8	19	23	14	37	7	4	11	68
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2	0	2	22	3	25	39	62	101	6	4	10	138
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	0	1	8	6	14	18	27	45	15	11	26	86
8	Badan Penghubung Provinsi	3	0	3	9	3	12	8	22	30	1	3	4	49
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	0	2	26	17	43	51	63	114	5	3	8	167
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	0	0	0	5	5	10	6	23	29	5	4	9	48
11	Biro Adm. Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	0	0	0	4	4	8	16	14	30	4	0	4	42
12	Biro Adm. Perekonomian	0	0	0	11	4	15	13	20	33	4	2	6	54
13	Biro Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	0	0	0	1	0	1	6	8	14	6	1	7	22
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	-	0	0	1	1	2	14	13	27	3	1	4	33
15	Biro Hukum	0	0	0	5	0	5	8	17	25	2	3	5	35

16	Biro Organisasi	0	0	0	10	2	12	7	11	18	4	3	7	37
17	Biro Otonomi Daerah	0	0	0	6	4	10	7	17	24	4	3	7	41
18	Biro Umum	9	1	10	52	33	85	46	41	87	2	5	7	189
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	2	1	3	57	15	72	81	33	114	11	3	14	203
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	24	0	24	79	10	89	65	48	113	17	5	22	248
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	1	0	1	9	6	15	42	29	71	7	4	11	98
22	Dinas Kehutanan Provinsi	2	0	2	77	25	102	252	88	340	34	5	39	483
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	1	0	1	25	9	34	57	46	103	16	5	21	159
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	1	0	1	5	3	8	17	13	30	7	2	9	48
25	Dinas Kesehatan Provinsi	2	1	3	26	20	46	71	128	199	10	24	34	282
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	0	0	0	9	5	14	19	16	35	5	3	8	57
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	0	0	0	9	4	13	14	28	42	8	5	13	68
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	0	0	0	6	2	8	18	20	38	9	6	15	61
29	Dinas Pangan Provinsi	0	0	0	5	0	5	18	30	48	7	7	14	67
30	Dinas Pariwisata Provinsi	0	0	0	9	3	12	25	25	50	3	9	12	74
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	0	0	0	9	3	12	22	27	49	10	7	17	78
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	0	0	0	1	5	6	10	41	51	4	5	9	66
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	0	0	0	13	12	25	27	20	47	13	2	15	87
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	1	0	1	9	3	12	15	22	37	8	10	18	68

35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	13	9	22	254	228	482	1397	1976	3373	999	902	1901	5778
36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	1	0	1	3	3	6	3	32	35	4	3	7	49
37	Dinas Perhubungan Provinsi	1	2	3	22	12	34	42	28	70	6	2	8	115
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	0	0	0	13	7	20	37	36	73	10	5	15	108
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	2	0	2	58	8	66	97	59	156	23	18	41	265
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	0	0	0	15	2	17	39	51	90	5	8	13	120
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	0	0	0	2	3	5	35	23	58	7	4	11	74
42	Dinas Sosial Provinsi	3	2	5	37	43	80	42	53	95	13	8	21	201
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	3	0	3	59	29	88	121	103	224	23	14	37	352
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	3	0	3	41	19	60	62	38	100	20	15	35	198
45	Inspektorat Daerah	0	0	0	7	2	9	32	35	67	11	9	20	96
46	Rumah Sakit Madani Palu	5	1	6	20	32	52	57	166	223	10	26	36	317
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	2	5	7	43	119	162	111	401	512	37	84	121	802
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	6	0	6	49	2	51	36	6	42	10	1	11	110
49	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
50	Sekretariat DPRD Provinsi	1	1	2	20	6	26	23	36	59	0	7	7	94
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>26</b>	<b>121</b>	<b>1256</b>	<b>778</b>	<b>2034</b>	<b>3298</b>	<b>4142</b>	<b>7440</b>	<b>1452</b>	<b>1276</b>	<b>2728</b>	<b>12.323</b>

**Rekap PNS Berdasarkan Golongan Ruang**

NO.	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I	95	1%	26	0%	121
2	II	1256	10%	778	6%	2034
3	III	3298	27%	4142	34%	7440
4	IV	1452	12%	1276	10%	2728
<b>TOTAL</b>		<b>6.101</b>	<b>49.51%</b>	<b>6.222</b>	<b>50.49%</b>	<b>12.323</b>

**5. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

No.	PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN PNS									JUMLAH
		PENDIDIKAN DASAR (SD - SMA)			PENDIDIKAN DIPLOMA			PENDIDIKAN TINGGI (S1 - S3)			
		P	W	JMLH	P	W	JMLH	P	W	JMLH	
1	Badan Kepegawaian Daerah	24	9	33	1	2	3	27	24	51	87
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	17	4	21	1	1	2	22	10	32	55
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	8	27	3	2	5	22	23	45	77
4	Badan Pendapatan Daerah	61	40	101	1	3	4	79	78	157	262
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	15	9	24	2	2	4	25	15	40	68
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27	11	38	1	3	4	41	55	96	138

7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12	6	18	0	1	1	30	37	67	86
8	Badan Penghubung Provinsi	14	4	18	1	2	3	6	22	28	49
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24	19	43	5	7	12	55	57	112	167
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	7	9	16	0	0	0	9	23	32	48
11	Biro Adm. Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	4	4	8	1	0	1	19	14	33	42
12	Biro Adm. Perekonomian	13	10	23	1	0	1	14	16	30	54
13	Biro Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	2	1	3	0	0	0	11	8	19	22
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	3	2	5	0	0	0	15	13	28	33
15	Biro Hukum	4	3	7	0	3	3	11	14	25	35
16	Biro Organisasi	10	4	14	0	0	0	11	12	23	37
17	Biro Otonomi Daerah	6	6	12	1	0	1	10	18	28	41
18	Biro Umum	72	47	119	1	1	2	36	32	68	189
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	61	19	80	8	1	9	82	32	114	203
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	103	11	114	7	4	11	75	48	123	248
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	11	7	18	0	4	4	48	28	76	98
22	Dinas Kehutanan Provinsi	150	24	174	5	5	10	210	89	299	483

23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	30	12	42	4	3	7	65	45	110	159
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	8	5	13	0	1	1	22	12	34	48
25	Dinas Kesehatan Provinsi	32	20	52	16	34	50	61	119	180	282
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	9	7	16	1	1	2	23	16	39	57
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	13	8	21	1	1	2	17	28	45	68
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	7	4	11	0	1	1	26	23	49	61
29	Dinas Pangan Provinsi	9	6	15	0	3	3	21	28	49	67
30	Dinas Pariwisata Provinsi	13	7	20	3	0	3	21	30	51	74
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	12	5	17	1	0	1	28	32	60	78
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	2	7	9	0	3	3	13	41	54	66
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	18	15	33	0	1	1	35	18	53	87
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	11	8	19	0	1	1	22	26	48	68
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	291	222	513	53	43	96	2319	2850	5169	5778
36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	4	4	8	0	12	12	7	22	29	49
37	Dinas Perhubungan Provinsi	36	21	57	4	8	12	31	15	46	115



38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	20	8	28	2	4	6	38	36	74	108
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	83	13	96	0	2	2	97	70	167	265
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	26	14	40	4	8	12	29	39	68	120
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	4	2	6	4	1	5	36	27	63	74
42	Dinas Sosial Provinsi	47	51	98	1	6	7	47	49	96	201
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	98	51	149	0	0	0	108	95	203	352
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	60	20	80	6	6	12	60	46	106	198
45	Inspektorat Daerah	13	5	18	1	0	1	36	41	77	96
46	Rumah Sakit Madani Palu	18	11	29	33	111	144	41	103	144	317
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	41	71	112	64	273	337	88	265	353	802
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	66	2	68	0	0	0	35	7	42	110
49	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
50	Sekretariat DPRD Provinsi	20	14	34	3	1	4	21	35	56	94
<b>TOTAL</b>		<b>1650</b>	<b>870</b>	<b>2520</b>	<b>240</b>	<b>565</b>	<b>805</b>	<b>4211</b>	<b>4787</b>	<b>8998</b>	<b>12.323</b>

**Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan**

No.	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	DASAR	1650	13.39%	870	7.06%	2520
2	DIPLOMA	240	1.95%	565	4.58%	805
3	TINGGI	4211	34.17%	4787	38.85%	8998
<b>TOTAL</b>		<b>6.101</b>	<b>49.51%</b>	<b>6.222</b>	<b>50.49%</b>	<b>12.323</b>

**6. Keadaan / Formasi Jabatan Struktural (non KTU SMA/SMK)**

No.	PERANGKAT DAERAH	FORMASI JAB STRUKTURAL				JML	JENIS KELAMIN PEJABAT STRUKTURAL												JML	FORMASI JAB KOSONG				JML	
		I	II	III	IV		I			II			III			IV				I	II	III	IV		
							P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML							
1	Badan Kepegawaian Daerah	-	1	5	14	20	-	-	-	1	-	1	4	1	5	11	3	14	20						-
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	-	1	5	11	17	-	-	-	1	-	1	5	-	5	6	5	11	17						-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	4	9	14	-	-	-	1	-	1	3	1	4	6	3	9	14						-
4	Badan Pendapatan Daerah	-	1	16	48	65	-	-	-	1	-	1	11	5	16	27	20	47	64					1	1
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	3	2	5	9	6	15	21						-
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	4	1	5	9	6	15	21						-
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	1	4	11	16	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	8	11	15				1		1

8	Badan Penghubung Provinsi	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	5					-	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1	5	15	21	-	-	-	-	-	-	4	1	5	8	7	15	20	-	1				1
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	-	1	3	9	13	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	5	9	13				1	1	
11	Biro Pegadaian Barang Dan Jasa	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	9	-	9	13						
12	Biro Adm. Perekonomian Dan Pembangunan	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	6	3	9	13						-
13	Biro Bina Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	5	9	13						-
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	5	9	13						-
15	Biro Hukum	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	7	9	13						-
16	Biro Organisasi	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	5	9	13						-
17	Biro Otonomi Daerah	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	7	9	13						-
18	Biro Umum	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	1	2	3	6	3	9	13						-
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	-	1	6	18	25	-	-	-	1	-	1	5	-	5	14	4	18	24						-
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	-	1	8	24	33	-	-	-	1	-	1	7	1	8	14	10	24	33						-
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	-	1	11	33	45	-	-	-	1	-	1	8	3	11	20	13	33	45						-
22	Dinas Kehutanan Provinsi	-	1	19	57	77	-	-	-	1	-	1	19	-	19	43	13	56	76				1	1	
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	-	1	11	33	45	-	-	-	1	-	1	9	2	11	20	13	33	45						-

24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	-	1	4	11	16	-	-	-	1	-	1	4	-	4	3	4	7	12					4	4	
25	Dinas Kesehatan Provinsi	-	1	7	21	29	-	-	-	-	1	1	5	2	7	11	10	21	29							-
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	-	1	1	4	1	5	10	5	15	21							-
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	-	1	5	14	20	-	-	-	-	1	1	5	-	5	3	11	14	20							-
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	-	1	4	13	18	-	-	-	1	-	1	1	3	4	7	6	13	18							-
29	Dinas Pangan Provinsi	-	1	4	13	18	-	-	-	1	-	1	3	1	4	7	6	13	18							-
30	Dinas Pariwisata Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	13	15	21							-
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	3	1	4	9	6	15	20					1	1	
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	2	3	5	3	12	15	21							-
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	5	-	5	8	7	15	21							-
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	-	1	7	21	29	-	-	-	-	1	1	4	3	7	9	12	21	29							-
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	-	1	13	41	55	-	-	-	1	-	1	7	6	13	21	20	41	55							-
36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	-	1	3	6	10	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	4	6	10							-

37	Dinas Perhubungan Provinsi	-	1	5	14	20	-	-	-	1	-	1	4	1	5	10	4	14	20							-	
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	-	1	7	21	29	-	-	-	1	-	1	5	2	7	11	10	21	29								-
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	-	1	10	30	41	-	-	-	-	1	1	6	4	10	19	11	30	41								-
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	-	1	6	18	25	-	-	-	1	-	1	3	3	6	11	7	18	25								-
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	-	1	5	15	21	-	-	-	1	-	1	3	2	5	10	5	15	21								-
42	Dinas Sosial Provinsi	-	1	8	24	33	-	-	-	1	-	1	6	2	8	15	8	23	32							1	1
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	-	1	9	27	37	-	-	-	-	1	1	6	3	9	17	10	27	37								-
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	-	1	9	27	37	-	-	-	1	-	1	5	3	8	12	15	27	36						1	1	
45	Inspektorat Daerah	-	1	4	2	7	-	-	-	1	-	1	3	1	4	1	1	2	7								-
46	Rumah Sakit Madani Palu	-	-	3	7	10			-			-	3	3		7	7	10									-
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	-	-	12	18	30			-			-	6	6	12	7	11	18	30								-
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	-	1	6	13	20	-	-	-	1	-	1	5	1	6	11	2	13	20								-
49	Sekretariat Daerah	1	6	-	-	7	1	-	1	5	1	6	-	-	-	-	-	-	7								-
50	Sekretariat DPRD Provinsi	-	1	3	6	10	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	4	6	10								-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>52</b>	<b>291</b>	<b>825</b>	<b>1.169</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>204</b>	<b>83</b>	<b>287</b>	<b>452</b>	<b>366</b>	<b>818</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>			

**Rekap Keadaan / Formasi PNS Jabatan Struktural (Eselon)**

No.	Ess.		Formasi	Jmlh Ess.	Ess. Terisi	Ess. Lowong	Jenis Kelamin Pejabat		
							P	W	Jumlah
1	I	I.b	1	1	1	0	1	0	1
2	II	II.a	43	52	51	1	41	10	51
3		II.b	9						
4	III	III.a	209	291	288	3	204	83	287
5		III.b	82						
6	IV	IV.a	822	825	817	8	452	366	818
7		IV.b	3						
<b>Total</b>			<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.157</b>	<b>12</b>	<b>698</b>	<b>459</b>	<b>1.157</b>

**7. Keadaan Pendidikan PNS Pejabat Struktural**

No.	PERANGKAT DAERAH	ESELON I				ESELON II				ESELON III					ESELON IV					TTL	
		S./I D.IV	S2	S3	JML	S./I D.IV	S2	S3	JML	D./I D.III	S./I D.IV	S2	S3	JML	SMA/ SMK	D./I D.III	S./I D.IV	S2	S3		JML
1	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	5	1	-	5	8	-	14	20
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	5	-	-	8	3	-	11	17
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	4	-	-	4	5	-	9	14
4	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	9	-	16	4	1	29	13	-	47	64
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	5	-	2	7	6	-	15	21

6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	5	-	-	6	9	-	15	21
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	5	6	-	11	15
8	Badan Penghubung Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	4	5
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	7	7	1	15	20
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	4	5	-	9	13
	Biro Pegadaian Barang Dan Jasa	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	-	-	6	3	-	9	13
12	Biro Adm. Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	6	3	-	9	13
13	Biro Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	4	5	-	9	13
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	6	3	-	9	13
15	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	-	-	5	4	-	9	13
16	Biro Organisasi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	4	5	-	9	13
17	Biro Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	3	6	-	9	13
18	Biro Umum	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	5	4	-	9	13
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	6	-	-	7	10	-	17	24
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	-	8	-	-	13	11	-	24	33
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6	-	11	7	-	17	9	-	33	45

22	Dinas Kehutanan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	12	1	19	-	-	44	12	-	56	76
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	10	-	11	-	-	19	14	-	33	45
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	4	-	-	2	5	-	7	12
25	Dinas Kesehatan Provinsi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	-	7	-	-	11	10	-	21	29
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	1	11	3	-	15	21
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	5	-	1	5	8	-	14	20
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	4	1	-	4	8	-	13	18
29	Dinas Pangan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	4	-	-	5	8	-	13	18
30	Dinas Pariwisata Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	5	-	1	6	8	-	15	21
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	4	-	-	8	7	-	15	20
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	5	1	-	11	3	-	15	21
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	5	-	-	9	6	-	15	21
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	6	-	7	1	-	9	11	-	21	29
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	5	2	13	-	-	24	17	-	41	55
36	Dinas Pengendalian	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	3	-	-	5	1	-	6	10



	Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi																				
37	Dinas Perhubungan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	5	-	-	12	2	-	14	20
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	-	7	-	-	11	10		21	29
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	-	10	-	-	14	16	-	30	41
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	6	1	-	13	4	-	18	25
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	5	-	-	7	8	-	15	21
42	Dinas Sosial Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	-	8	1	-	12	10	-	23	32
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	-	9	3	1	12	11	-	27	37
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	-	8	1	-	15	10	1	27	36
45	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	4	-	-	1	1	-	2	7
46	Rumah Sakit Madani Palu				-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	3	3	-	7	10
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata				-	-	-	-	-	-	5	7	-	12	-	2	8	8	-	18	30
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	-	6	-	-	6	7		13	20
49	Sekretariat Daerah	-		1	1	1	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
50	Sekretariat DPRD Provinsi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	4	2	-	6	10
<b>TOTAL</b>		-	-	1	1	6	39	6	51	1	102	178	7	288	21	10	445	339	2	817	1.157

**Rekap Keadaan Pendidikan PNS Pejabat Struktural (Eselon)**

NO.	Jenjang Pendidikan	ESS. I	ESS. II	ESS. III	ESS. IV	JMLH
1	SMA/SMK	0	0	0	21	21
2	D I - D III	0	0	1	10	11
3	S1 / D IV	0	6	102	445	553
4	S 2	0	39	178	339	556
5	S 3	1	6	7	2	16
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>51</b>	<b>288</b>	<b>817</b>	<b>1.157</b>

**8. Keadaan Diklat PIM PNS Pejabat Struktural Perperangkat Daerah**

No.	PERANGKAT DAERAH	FORMASI JABATAN STRUKTURAL				JML	FORMASI JABATAN STRUKTURAL TERISI				JML	BELUM PIM				TTL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	Badan Kepegawaian Daerah	0	1	5	14	20	0	1	5	14	20	0	1	1	7	9
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	0	1	5	11	17	0	1	5	11	17	0	0	0	0	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	4	9	14	0	1	4	9	14	0	0	0	3	3
4	Badan Pendapatan Daerah	0	1	16	48	65	0	1	16	47	64					0
5	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	0	2	6	8
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	1	1	9	11
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	1	4	11	16	0	1	3	11	15	0	1	0	1	2
8	Badan Penghubung Provinsi	0	0	1	4	5	0	0	1	4	5	0	0	0	4	4
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	5	15	21	0	0	5	15	20	0	0	1	6	7
10	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	0	0	0	0
11	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	2	6	9
12	Biro Adm. Perekonomian Dan Pembangunan	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	2	4	7

13	Biro Bina Adm. Wilayah Daerah Dan Pemerintahan	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	0	1	2
14	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	1	6	8
15	Biro Hukum	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	1	8	10
16	Biro Organisasi	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	0	3	5	8
17	Biro Otonomi Daerah	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	1	0	4	5
18	Biro Umum	0	1	3	9	13	0	1	3	9	13	0	0	0	0	0
19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	0	1	6	18	25	0	1	5	18	24	0	0	0	0	0
20	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi	0	1	8	24	33	0	1	8	24	33	0	0	0	0	0
21	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	0	1	11	33	45	0	1	11	33	45	0	0	0	17	17
22	Dinas Kehutanan Provinsi	0	1	19	57	77	0	1	19	56	76	0	0	0	36	36
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	0	1	11	33	45	0	1	11	33	45	0	0	2	24	26
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi	0	1	4	11	16	0	1	4	7	12	0	0	1	2	3
25	Dinas Kesehatan Provinsi	0	1	7	21	29	0	1	7	21	29	0	1	2	15	18
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	0	0	7	7
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi	0	1	5	14	20	0	1	5	14	20	0	0	0	6	6
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	0	1	4	13	18	0	1	4	13	18	0	0	0	5	5
29	Dinas Pangan Provinsi	0	1	4	13	18	0	1	4	13	18	0	0	0	5	5
30	Dinas Pariwisata Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	0	1	3	4
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	4	15	20	0	0	1	7	8
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	1	0	7	8
33	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	0	0	6	6
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	0	1	7	21	29	0	1	7	21	29	0	0	1	6	7
35	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	0	1	13	41	55	0	1	13	41	55	0	1	9	21	31

36	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi	0	1	3	6	10	0	1	3	6	10	0	1	0	0	1
37	Dinas Perhubungan Provinsi	0	1	5	14	20	0	1	5	14	20	0	1	1	9	11
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi	0	1	7	21	29	0	1	7	21	29	0	1	2	10	13
39	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi	0	1	10	30	41	0	1	10	30	41	0	0	1	12	13
40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi	0	1	6	18	25	0	1	6	18	25	0	0	3	4	7
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi	0	1	5	15	21	0	1	5	15	21	0	0	1	11	12
42	Dinas Sosial Provinsi	0	1	8	24	33	0	1	8	23	32	0	1	1	2	4
43	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi	0	1	9	27	37	0	1	9	27	37	0	0	0	0	0
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	0	1	9	27	37	0	1	8	27	36	0	1	0	12	13
45	Inspektorat Daerah	0	1	4	2	7	0	1	4	2	7	0	0	1	0	1
46	Rumah Sakit Madani Palu	0	0	3	7	10	0	0	3	7	10	0	0	0	0	0
47	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	0	0	12	18	30	0	0	12	18	30	0	0	0	0	0
48	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	0	1	6	13	20	0	1	6	13	20	0	0	2	6	8
49	Sekretariat Daerah	1	6	0	0	7	1	6	0	0	7	1	1	0	0	2
50	Sekretariat DPRD Provinsi	0	1	3	6	10	0	1	3	6	10	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>52</b>	<b>291</b>	<b>825</b>	<b>1169</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>287</b>	<b>818</b>	<b>1157</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>303</b>	<b>366</b>

9. Keadaan PNS Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						TTL	KETERANGAN (PERANGKAT DAERAH)
		AHLI			TERAMPIL				
		P	W	JMLH AHLI	P	W	JMLH TERAMPIL		
1	Administrator Kesehatan	10	23	33	0	0	0	33	DINKES (18 ORANG), RSUD MADANI (5 ORANG), RSUD UNDATA (10 ORANG)
2	Analisis Kepegawaian	0	2	2	0	0	0	2	BKD ( 1 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG)
3	Analisis Ketahanan Pangan	3	1	4	0	0	0	4	DINAS PANGAN
4	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2	0	2	1	0	1	3	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
5	Apoteker	10	18	28	7	37	44	72	RSUD UNDATA (43 ORANG), RSUD MADANI (29 ORANG)
6	Arsiparis	2	6	8	3	2	5	13	DINAS NAKERTRANS ( 1 ORANG ), DIPUSDA ( 10 ORANG ), RSUD UNDATA (3 ORANG)
7	Auditor	11	16	27	2	0	2	29	RSUD UNDATA ( 1 ORANG), INSPEKTORAT ( 28 ORANG)
8	Bidan	0	46	46	0	96	96	142	DINKES (1 ORANG), RSUD UNDATA (109 ORANG), RSUD MADANI (32 ORANG)
9	Dokter	31	62	93	0	0	0	93	DINKES (2 ORANG), RSUD UNDATA ( 64 ORANG ), RSUD MADANI (27 ORANG)
10	Elektromedis	0	1	1	1	1	2	3	RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG)
11	Epidemiolog Kesehatan	4	15	19	0	0	0	19	DINKES (14 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG), RSUD UNDATA ( 4 ORANG)
12	Fisioterapi	3	2	5	2	11	13	18	RSUD MADANI ( 5 ORANG), RSUD UNDATA (13 ORANG)
13	Guru	2281	2798	5079	0	0	0	5079	DINAS DIKBUD

14	Instruktur	8	1	9	11	1	12	21	DINAS NAKERTRANS
15	Medik Veteriner	1	1	2	0	0	0	2	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
16	Nutrisionis	0	19	19	2	12	14	33	DINKES ( 2 ORANG), RSUD UNDATA (19 ORANG), RSUD MADANI (12 ORANG)
17	P2UPD	15	15	30	0	0	0	30	INSPEKTORAT
18	Peneliti	1	0	1	0	0	0	1	BPPID
19	Pengantar Kerja	1	1	2	1	0	1	3	DINAS NAKERTRANS
20	Pengawas	78	23	101	0	0	0	101	DINAS DIKBUD
21	Pengawas Benih Tanaman	9	3	12	9	13	22	34	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (29 ORANG)
22	Pengawas Bibit Ternak	3	0	3	6	0	6	9	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (9 ORANG)
23	Pengawas Ketenagakerjaan	11	7	18	0	2	2	20	DINAS NAKERTRANS
24	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	0	2	1	0	1	3	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
25	Pengawas Mutu Pakan	0	0	0	3	0	3	3	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
26	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	6	3	9	36	8	44	53	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (51 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (2 ORANG)
27	Penggerak Swadaya Masyarakat	0	1	1	0	0	0	1	DINAS NAKERTRANS
28	Penguji Mutu Barang	1	1	2	0	3	3	5	DISPERINDAG
29	Penyuluh Kehutanan	36	19	55	8	2	10	65	DISHUT
30	Penyuluh Kesehatan	4	6	10	0	0	0	10	DINKES (9 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG)
31	Penyuluh Perindag	1	1	2	0	1	1	3	DISPERINDAG

32	Penyuluh Pertanian	11	8	19	0	0	0	19	DINAS PANGAN ( 1 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA ( 9 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN ( 9 ORANG)
33	Perantara Hub Industrial	1		1	0	0	0	1	DINAS NAKERTRANS
34	Perawat	39	114	153	67	210	277	430	DINKES ( 2 ORANG), RSUD UNDATA ( 309 ORANG), RSUD MADANI ( 119 ORANG)
35	Perawat Gigi	0	0	0	1	1	2	2	RSUD MADANI ( 2 ORANG)
36	Perekam Medis	0	0	0	2	1	3	3	RSUD UNDATA ( 2 ORANG), RSUD MADANI ( 1 ORANG)
37	Polisi Kehutanan	13	0	13	17		17	30	DISHUT
38	Pranata Komputer	0	2	2	0	2	2	4	DINKES ( 2 ORANG), RSUD UNDATA ( 2 ORANG ),
39	Pranata Laboratorium Kesehatan	1	6	7	6	18	24	31	DINKES ( 12 ORANG), RSUD UNDATA ( 14 ORANG ), RSUD MADANI ( 5 ORANG)
40	Psikolog	2	2	4	0	0	0	4	RSUD UNDATA ( 1 ORANG), RSUD MADANI ( 3 ORANG)
41	Pustakawan	2	9	11	4	13	17	28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI
42	Radiografer	2	2	4	3	5	8	12	RSUD UNDATA ( 9 ORANG), RSUD MADANI ( 3 ORANG)
43	Sanitarian	4	9	13	7	18	25	38	DINKES ( 6 ORANG), RSUD UNDATA ( 25 ORANG), RSUD MADANI ( 7 ORANG)
44	Statistisi	0	0	0	1	0	1	1	DISPERINDAG ( 1 ORANG )
45	Teknik Transfusi Darah	0	0	0	1	0	1	1	RSUD MADANI
46	Widyaiswara	18	16	34	0	0	0	34	BPSDM ( 23 ORANG), DINKES ( 5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA ( 6 ORANG )
<b>TOTAL</b>		<b>2627</b>	<b>3259</b>	<b>5886</b>	<b>202</b>	<b>457</b>	<b>659</b>	<b>6.545</b>	

**Rekap PNS Fungsional Per Bidang Tugas Fungsional**

NO	BIDANG JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JUMLAH
		AHLI			TERAMPIL			
		P	W	JMLH AHLI	P	W	JMLH TERAMPIL	
1	KESEHATAN	110	325	435	99	410	509	944
2	PENDIDIKAN	2359	2821	5180	0	0	0	5180
3	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	85	78	163	39	24	63	226
4	PERTANIAN	73	35	108	64	23	87	195
<b>TOTAL</b>		<b>2627</b>	<b>3259</b>	<b>5886</b>	<b>202</b>	<b>457</b>	<b>659</b>	<b>6.545</b>



Bab 2

**PNS Kabupaten/Kota  
Sulawesi Tengah**

**1. PNS Kab/Kota Perjenis Kelamin**

NO.	NAMA KAB/KOTA	PEGAWAI NEGERI SIPIL		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Kabupaten Banggai	3616	4200	7816
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	1716	1635	3351
3	Kabupaten Banggai Laut	986	1119	2105
4	Kabupaten Buol	1919	2073	3992
5	Kabupaten Donggala	2703	3059	5762
6	Kabupaten Morowali	1649	1753	3402
7	Kabupaten Morowali Utara	1569	1913	3482
8	Kabupaten Parigi Moutong	3009	3472	6481
9	Kabupaten Poso	2974	4047	7021
10	Kabupaten Sigi	2293	3097	5390
11	Kabupaten Tojo Una-Una	1879	2579	4458
12	Kabupaten Toli-Toli	2416	2933	5349
13	Kota Palu	2157	4242	6399
<b>TOTAL</b>		<b>28.886</b>	<b>36.122</b>	<b>65.008</b>

2. PNSD Pemda Se-Sulteng Vs Penduduk Sulteng

NO.	NAMA KAB/KOTA	Jumlah Penduduk	PNS	% PNSD Thdp Penduduk
1	Provinsi Sulawesi Tengah	0	12.323	0
2	Kabupaten Banggai	360022	7816	2.17%
3	Kabupaten Banggai Kepulauan	116011	3351	2.89%
4	Kabupaten Banggai Laut	70886	2105	2.97%
5	Kabupaten Buol	152296	3992	2.62%
6	Kabupaten Donggala	296380	5762	1.94%
7	Kabupaten Morowali	115199	3402	2.95%
8	Kabupaten Morowali Utara	120322	3482	2.89%
9	Kabupaten Parigi Moutong	465883	6481	1.39%
10	Kabupaten Poso	240812	7021	2.92%
11	Kabupaten Sigi	232174	5390	2.32%
12	Kabupaten Tojo Una-Una	149214	4458	2.99%
13	Kabupaten Toli-Toli	228496	5349	2.34%
14	Kota Palu	374020	6399	1.71%
<b>T O T A L (Sulawesi Tengah)</b>		<b>2.921.715</b>	<b>77.331</b>	<b>2.65%</b>

3. PNS Kab/Kota Pergolongan Ruang

NO.	NAMA KAB/KOTA	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kabupaten Banggai	54	1850	4157	1755	7816
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	18	806	2040	487	3351
3	Kabupaten Banggai Laut	6	473	1325	301	2105
4	Kabupaten Buol	14	834	2532	612	3992
5	Kabupaten Donggala	81	1631	2913	1137	5762
6	Kabupaten Morowali	22	1021	1755	604	3402
7	Kabupaten Morowali Utara	8	825	1993	656	3482
8	Kabupaten Parigi Moutong	48	1748	3458	1227	6481
9	Kabupaten Poso	118	2151	3537	1215	7021
10	Kabupaten Sigi	37	1425	2873	1055	5390
11	Kabupaten Tojo Una-Una	30	1249	2577	602	4458
12	Kabupaten Toli-Toli	65	1209	3321	754	5349
13	Kota Palu	69	1222	3459	1649	6399
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>16.444</b>	<b>35.940</b>	<b>12.054</b>	<b>65.008</b>

#### 4. PNS Kab/Kota Perjenjang Pendidikan

NO.	NAMA KAB/KOTA	PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL							JUMLAH
		SD	SMP/ST/MTs	SMA /SMK/MA	DI s/d DIII	DIV & S1	S2	S3	
1	Kabupaten Banggai	20	51	1908	1303	4270	262	2	7816
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	6	14	697	565	1941	127	1	3351
3	Kabupaten Banggai Laut	0	4	303	421	1328	48	1	2105
4	Kabupaten Buol	2	16	970	824	2088	91	1	3992
5	Kabupaten Donggala	21	71	1724	794	2868	280	4	5762
6	Kabupaten Morowali	2	21	955	551	1733	138	2	3402
7	Kabupaten Morowali Utara	3	11	858	454	2053	103	0	3482
8	Kabupaten Parigi Moutong	27	29	1693	1047	3492	192	1	6481
9	Kabupaten Poso	24	105	2349	941	3334	262	6	7021
10	Kabupaten Sigi	11	28	1429	909	2703	307	3	5390
11	Kabupaten Tojo Una-Una	13	40	929	1219	2110	147	0	4458
12	Kabupaten Toli-Toli	12	56	1192	1223	2737	126	3	5349
13	Kota Palu	21	50	1410	966	3394	555	3	6399
<b>TOTAL</b>		<b>162</b>	<b>496</b>	<b>16417</b>	<b>11217</b>	<b>34051</b>	<b>2638</b>	<b>27</b>	<b>65.008</b>

**Rekap PNS Perkategori Pendidikan**

NO.	NAMA KAB/KOTA	PENDIDIKAN			JUMLAH
		DASAR	DIPLOMA	TINGGI	
1	Kabupaten Banggai	1979	1303	4534	7816
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	717	565	2069	3351
3	Kabupaten Banggai Laut	307	421	1377	2105
4	Kabupaten Buol	988	824	2180	3992
5	Kabupaten Donggala	1816	794	3152	5762
6	Kabupaten Morowali	978	551	1873	3402
7	Kabupaten Morowali Utara	872	454	2156	3482
8	Kabupaten Parigi Moutong	1749	1047	3685	6481
9	Kabupaten Poso	2478	941	3602	7021
10	Kabupaten Sigi	1468	909	3013	5390
11	Kabupaten Tojo Una-Una	982	1219	2257	4458
12	Kabupaten Toli-Toli	1260	1223	2866	5349
13	Kota Palu	1481	966	3952	6399
<b>TOTAL</b>		<b>17.075</b>	<b>11.217</b>	<b>36.716</b>	<b>65.008</b>

## Bab 3

### Penutup

#### 1. Kesimpulan

- a. PNS Prov. Sulteng pada semester I 2019 berjumlah 12.323 (Desember 2018, 12.462). PNS Wanita lebih mendominasi dengan jumlah sebanyak 6.222 PNS. Berdasarkan jenis jabatan, masing-masing berjumlah PNS Struktural 1157, PNS Fungsional 6545 dan PNS Pelaksana 4621. PNS Prov. Sulteng mayoritas bergolongan ruang III dan didominasi oleh PNS Wanita. Pendidikan PNS Prov. Sulteng sebagian besar telah berpendidikan tinggi (jenjang S1 – S3).
- b. Formasi jabatan struktural (PP 18/2016) lingkup Prov. Sulteng sebanyak 1169 jabatan. Pada semester I ini, jabatan terisi sebanyak 1157 jabatan (12 kosong). Jabatan tersebut diisi oleh PNS Pria 698 dan PNS Wanita 459. Pendidikan pejabat struktural umumnya adalah pendidikan tinggi (S1 – S3) sebagian besar adalah S2. Masih terdapat 366 pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat PIM, masing-masing PIM I = 1 PNS, PIM II = 19 PNS, PIM III = 43 PNS dan PIM IV = 303 PNS.
- c. Terdapat 46 Jabatan Fungsional lingkup Prov. Sulteng. Didominasi oleh JF jenjang Ahli dan mayoritas pejabat fungsional adalah PNS Wanita. Jabatan fungsional terbanyak adalah bidang pendidikan khususnya Guru.
- d. Jumlah PNS Kab/Kota di Sulteng mencapai 65.008 orang. Didominasi oleh PNS Wanita. Umumnya bergolongan III. Rata-rata pendidikan pegawai Kab/Kota tersebut pada jenjang pendidikan S1. Pada jenjang pendidikan S3, PNS Kab/Kota masih sangat minim. Bahkan 2 Pemda sama sekali belum memiliki PNS yang bergelar Doktor.

#### 2. Saran

- a. Adanya kecenderungan jumlah PNS Wanita semakin meningkat maka kebijakan yang ramah gender perlu dikedepankan.
- b. Dorongan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan perlu diperbesar. Utamanya ke jenjang S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama Pemda dengan lembaga/instansi, penyelenggara pendidikan atau penyedia beasiswa, hendaknya dibangun dan dikongkritkan secara nyata.
- c. Kab/Kota perlu merangsang pegawainya untuk berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain agar komposisi pegawai berpendidikan tinggi bisa lebih besar. Dengan kembali bersekolah bisa sebagai sarana untuk menambah wawasan dan membangun jaringan baru. Tentunya akan bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur saat kembali bekerja.
- d. Pembinaan dan pengawasan Provinsi terhadap Kab/Kota, khususnya dalam pembentukan formasi jabatan struktural perlu diintensifkan. Mengingat hal ini berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan.
- e. Pendokumentasian data dan informasi seperti penyusunan Buku semacam ini tetap perlu dilanjutkan.